USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU

Problema dan Solusi

Indra Safri

*Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Fisipol
Universitas Islam Riau dan Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Industri
dan Perkotaan Universitas Riau*

Abstrak

Krisis ekonomi yang melanda negeri menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi yang berdampak kepada perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian ditengah krisis ekonomi ini sebagian besar Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Riau justru dapat bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang dapat dijadikan andalan untuk perekonomian masyarakat. Disamping itu UKM memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, namun kontribusinya pada PDRB masih relatif kecil. Salah satu usaha pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM ini adalah dengan memperkuat pada sektor dengan menyalur berbagai bentuk pinjaman modal serta pola kemitraan dengan berbagai usaha besar. Namun dalam perjalanannya terdapat hambatan yang cukup berarti sehingga sebagian besar usaha belum dapat menikmati pinjaman tersebut. Hambatan itu berupa persyaratan administratif yang cukup ketat, serta terbatasnya akses kepada sumber dana. Disamping itu faktor lain yang menjadi hambatan yang cukup berarti adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya organisasi dan manajemen serta terbatasnya jaringan usaha yang dimiliki oleh UKM. Sedangkan hambatan ekstern berupa iklim usaha yang kurang kondusif, persaingan yang tidak seimbang dan kondisi perbankan yang belum sehat. Oleh sebab itu untuk menunjang perkembangan ini campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Campur tangan ini melalui berbagai kebijakan baik kebijakan yang memberikan iklim yang kondusif maupun kebijakan yang bersifat intervensi.

Kata Kunci: Provinsi Riau, UKM, Hambatan Intern dan Ektern, Kebijakan Kondusif dan Kebijakan Intervensi.

Pendahuluan

Provinsi Riau secara geografis terdiri dari 2 kawasan, yakni kawasan daratan dan kawasan kepulauan. Kedua kawasan tersebut secara ekonomi cukup potensial. Kawasan daratan kaya akan sumber daya alamnya baik sumber daya mineral maupun sumberdaya alam hayati, sedangkan kawasan kepulauan yang dikenal dengan Riau Kepulauan meru-

pakan kawasan strategis yang sangat potensial untuk perdagangan, jasa, industri dan pariwisata. Baik wilayah daratan maupun kepulauan berbatasan langsung dengan negara tetangga yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat yakni Singapura dan Malaysia. Hal ini secara ekonomis bisa menguntungkan dan bisa menjadi ancaman. Oleh sebab itu pembangunan provinsi Riau perlu

dikondisikan sedemikian rupa sehingga wilayah strategis itu dapat dimanfaatkan dan menguntungkan secara ekonomis.

Seiring dengan dicanangkannya otonomi daerah, provinsi Riau mengalami pemekaran wilayah kabupaten dan kota. Hingga saat ini tercatat 12 kabupaten dan 4 kota yang semula hanya terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota. Ke-16 kabupaten/kota tersebut tersebar baik diwilayah kepulauan maupun wilayah daratan. Adapun kabupaten/kota yang berada diwilayah daratan adalah Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kuantan Singingi, sedangkan kabupaten/kota yang berada pada kawasan kepulauan adalah Kepulauan Riau, Karimun, Batam, Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan ditinjau dari perkembangan pembangunan di kabupaten/kota akan semakin terkonsentrasi karena wilayah pembangunan disatu sisi semakin sempit, sedangkan disisi yang lain dengan adanya otonomi daerah dana pembangunan semakin meningkat. Dilihat dari luas wilayah provinsi Riau memiliki luas lebih kurang 329.867,61 Km. Luas wilayah tersebut di atas sebagian besar yakni 71,33 persen merupakan wilayah lautan dan hanya 28,67 persen daerah daratan. Dengan luas wilayah sebesar itu berdasarkan catatan jumlah penduduk Riau yang menghuni kedua kawasan sebanyak 4.733.948 orang (Riau dalam angka, 2000). Jumlah penduduk sebesar itu sebagian besar berada di daerah perkotaan, seperti Pekanbaru, Batam, Tanjungpinang dan daerah perkotaan lainnya yang menjadi konsentrasi industri.

Dalam masa krisis ekonomi seba-

gaimana halnya daerah lain di Indonesia, Riau juga mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan ini sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat Riau secara keseluruhan. Namun demikian disisi lain ada usaha-usaha yang pada masa krisis justru mengalami pertumbuhan yang sangat berarti seperti usaha yang tergolong kedalam usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa UKM merupakan sektor usaha yang dapat diandalkan.

Sebagaimana halnya Indonesia, sektor UKM di Riau dalam perjalanannya hampir sama. Sektor ini juga memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja di Riau. Di sisi lain kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil. Kecilnya kontribusi yang diberikan tidak terlepas dari skala usaha yang sangat kecil, sehingga memberikan sumbangan yang sangat minim.

Gambaran Umum Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Riau

Sesuai dengan karakteristik wilayah provinsi Riau yang terdiri dari wilayah daratan dan Kepulauan sudah barang tentu memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Riau menyebar pada kedua kawasan tersebut. Secara garis besar untuk usaha kecil terdiri dari 4 bidang usaha yakni 1). Bidang Perdagangan, 2) Bidang Pertanian, 3) Bidang Industri Pengolahan dan 4) Bidang Aneka jasa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Keragaan Pengusaha Kecil di Provinsi Riau Per Sektor Tahun 2000.

No	Uraian	Satuan	Jumlah
I.	Bidang Perdagangan		
	1. Jumlah	Unit	142.840
	2. Tenaga Kerja	Orang	238.573
	3. Omzet	Rp Trilyun	5,79
II.	Bidang Pertanian		
	1. Jumlah	Unit	447.735
	1. Tenaga Kerja	Orang	529.784
	2. Omzet	Rp Trilyun	1,15
III.	Bidang Industri dan Pengolahan		
	1. Jumlah	Unit	23.286
	2. Tenaga Kerja	Orang	63.255
	3. Omzet	Rp Milyar	431,13
IV.	Bidang Aneka Jasa		
	1. Jumlah	Unit	65.039
	2. Tenaga Kerja	Orang	143.541
	3. Omzet	Rp Trilyun	1,46
	Jumlah		
	1. Jumlah	Unit	678.900
	2. Tenaga Kerja	Orang	973.153
	3. Omzet	Rp Trilyun	8,79

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2001

Data Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa usaha kecil dengan 678.900 unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 973.153 orang, dengan omzet sebesar Rp. 8,9 trilyun. Sementara itu jumlah penduduk Riau sebesar 4.733.948 Orang (Riau Dalam Angka, 2000). Ini berarti bahwa sebagian besar tenaga kerja di provinsi Riau diserap oleh Sektor UKM. Dilihat dari masing-masing bidang, bidang pertanian merupakan bidang yang paling besar menyerap tenaga kerja yakni 529.784 orang, besarnya penyerapan tenaga kerja tersebut bersamaan dengan besarnya jumlah unit usaha. Kondisi ini dapat dipahami karena sebagian besar penduduk Riau masih menggeluti bidang

ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian kalau dilihat dari omzetnya, bidang pertanian berada pada urutan ketiga setelah bidang perdagangan dan aneka jasa. Selain dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja, kinerja usaha kecil dapat juga dilihat dari sisi omzet yang dimilikinya. Omzet sebaran pengusaha kecil pada tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Sebaran Pengusaha Kecil Berdasarkan Omzet Tahun 2000

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Persentase
1.	Omzet < Rp 50 Juta	Unit	648.146	95,47
2.	Omzet Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 Juta	Unit	29.193	4,30
3.	Omzet Rp 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Unit	1,561	0,23
	Jumlah		678.900	100

Sumber: Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Riau, 2001

Merujuk pada data yang disajikan Tabel 2 di atas terlihat bahwa sebagian besar pengusaha kecil (95,47%) masih mempunyai omzet dibawah Rp. 50 Juta, sedangkan yang omzet penjualannya di atas 50 juta hanya 4,53%. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa *performance* usaha kecil di Provinsi Riau masih kurang mengembirakan. Oleh sebab itu,

untuk mendorong berkembangnya sektor ini perlu ditinjau dari berbagai sisi.

Faktor penunjang perkembangan usaha kecil yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk sentra-sentra pengembangan usaha kecil. Di Provinsi Riau telah terbentuk beberapa sentra pengembangan usaha kecil yang tersebar pada 15 kabupaten/kota seperti terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perkembangan Sentra Pengusaha Kecil di Provinsi Riau tahun 2000

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Kampar	14	304	663
2	Rokan Hulu	4	136	297
3	Pelelawan	5	131	220
4	Bengkalis	31	461	1.025
5	Dumai	4	78	885
6	Rokan Hilir	2	2	30
7	Siak	6	98	197
8	Indragiri Hulu	60	343	829
9	Kuantan Singingi	57	386	797
10	Indragiri Hilir	74	946	1.280
11	Kepulauan Riau	39	254	1.183
12	Karimun	8	53	173
13	Natuna	13	439	992
14	Pekanbaru	40	1.793	9.397
15	Batam	-	-	-
	Jumlah	357	5.424	17.469

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2001

Data Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sentra pengusaha kecil yang ada di Provinsi Riau berjumlah 357 dengan jumlah usaha 5.424 unit, dan

tenaga kerja yang terserap sebanyak 17.469 orang. Dari jumlah tersebut sentra pengusaha kecil yang paling banyak berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tetapi jumlah unit usaha terbanyak berada pada sentra-sentra yang ada di Kota Pekanbaru, yakni sebanyak 1.793 unit usaha, sedangkan serapan tenaga kerja yang terbesar juga berada pada sentra yang ada di Kota Pekanbaru, yakni sebanyak 9.397 orang.

Disamping usaha kecil, di Provinsi Riau juga banyak beroperasi usaha menengah. Pada tahun 2000 menurut Dinas Koperasi UKM Provinsi Riau tercatat sebanyak 1.118 unit usaha menengah yang tersebar di 8 sektor. Sektor Pertambangan dan penggalan sebanyak 23 unit, sektor industri dan pengolahan 199 unit, listrik gas dan air 12 unit, bangunan dan konstruksi 116 unit, perdagangan rumah makan dan hotel 529 unit, lembaga keuangan 119 unit, jasa kemasyarakatan 84 unit dan sektor angkutan sebanyak 36 Unit. Sebaran di atas menunjukkan bahwa usaha mene-

ngah di Provinsi Riau sebagian besar bergerak pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel.

Untuk menunjang perkembangan sektor usaha kecil dan menengah diperlukan adanya lembaga pembiayaan untuk membiayai operasi usaha tersebut. Di Provinsi Riau disamping Bank sebagai lembaga keuangan, juga ada lembaga pembiayaan lainnya yang turut menunjang tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah, seperti PT. Riau Modal Ventura dll. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sudah barang tentu sangat berarti bagi usaha kecil dan menengah di Provinsi Riau. Berbagai macam kredit telah disalurkan oleh lembaga-lembaga pembiayaan yang ada di Riau untuk usaha kecil dan menengah. Kredit yang telah disalurkan oleh Bank Umum melalui program Kredit Usaha Kecil di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Posisi Kredit Usaha Kecil Bank Umum Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau (Juta Rp)

No	Kabupaten/Kota	1997	1998	1999	2000	2001
1.	Kota Pekanbaru	2.134.857	3.043.737	2.453.765	3.589.905	4.402.111
2.	Bengkalis	613.056	660.878	533.637	523.167	954.588
3.	Kota Dumai	96.057	83.610	101.323	358.913	200.636
4.	Kepulauan Riau	643.036	902.290	249.689	428.470	504.126
5.	Batam	1.967.402	2.691.591	997.004	1.114.760	2.468.852
6.	Indragiri Hilir	953.328	1.229.429	1.243.222	907.242	953.127
7.	Indragiri Hulu	-	-	-	1.154.353	573.354
8.	Karimun	-	-	-	31.581	48.741
9.	Kabupaten Lain	1.410.188	1.224.087	2.144.513	2.598.651	3.837.510
	Jumlah	6.864.596	9.535.622	7.723.153	10.707.042	13.530.313

Sumber: Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah, Bank Indonesia 2001

Merujuk pada data Tabel 4 di atas terlihat bahwa posisi kredit usaha kecil yang disalurkan oleh Bank umum di Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali tahun 1999 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1998. Selama

kurun waktu lima tahun terakhir peningkatan persentase kredit usaha kecil secara rata-rata meningkat sebesar 19,42%. Tahun 2001 tercatat kredit usaha kecil yang telah disalurkan di Provinsi Riau melalui Bank Umum sebesar Rp. 13,530 Trilyun. Penyaluran kredit

tersebut tersebar di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau. Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau merupakan Kabupaten/Kota yang terbesar menerima penyaluran kredit tersebut. Tercatat pada tahun 2001 total kredit yang telah disalurkan di Kota Pekanbaru berjumlah Rp.4,402 Trilyun. Hal ini dapat dipahami karena Kota Pekanbaru memiliki usaha kecil dan menengah terbesar di Provinsi Riau dan mempunyai akses informasi yang relatif baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Disamping Program KUK Pemerintah Propintah Riau melalui APBD juga menyalurkan pinjaman modal kepada Usaha Kecil dan Menengah dalam menunjang program ekonomi kerakyatan. Pinjaman modal tersebut disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau yang tersebar di beberapa Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Penyaluran Kedit tersebut telah mulai pada bulan November 2001 dan penyaluran ini berlanjut sampai dengan Mei 2002. Adapun besarnya pinjaman modal yang telah disalurkan sampai dengan 10 Mei 2002 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Dana Pinjaman Modal Pada BPD Riau Tahun 2002 (ribuan Rp)

No	Dinas/Badan	Rencana APBD	Masuk Rek.FKPPM	Realisasi		Pengambila Pinjaman modal	+/-
					% Realisasi		
1.	Tanaman Pangan	9.952.660	9.952.660	8.492.145	86,07%	60.790	1.460.515
2.	Peternakan	9.335.000	9.335.000	8.328.000	89,21%	6.187	1.007.000
3.	Perikanan dan kelauatan	14.105.700	14.105.699	12.680.215	89,89%	69.140	1.425.484
4.	Perindustrian dan Perdagangan	1.129.440	1.129.440	971.800	86,04%	-	157.640
5.	Perkebunan	16.844.775	16.833.333	13.347.362	79,29%	96.359	3.485.971
6.	Koperasi	750.000	750.000	700.000	93,33%	20.889	50.000
7.	Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat	700.000.	700.000	98.800	14,11%	-	601.200
	Jumlah	52.817.575	52.806.133	44.618.322	84,49%	253.368	8.187.810

Sumber: Riau Pos, 12 Mei 2002

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 10 Mei 2002 total modal yang tersedia untuk disalurkan di BPD Riau dalam rangka menunjang program ekonomi kerakyatan sebesar Rp. 52,806 milyar. Dari total modal tersebut yang sudah terealisasi penyalurannya sebesar Rp. 44,295 milyar atau 84,64%. Penyaluran pinjaman modal tersebut diklasifikasikan per Dinas dan Badan. Dinas dan Badan yang menerima plafon terbesar adalah Dinas Perkebunan yakni sebesar Rp.16,833 milyar. Dari plafon sebesar itu yang sudah disalurkan sebesar Rp.13,347 milyar atau 79,29%,

sedangkan realisasi penyaluran terbesar adalah Dinas Perikanan dan Kelautan yakni sebesar Rp. 12,680 Milyar dari plafon Rp. 14,105 milyar (89,89%). Besarnya plafon pada Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan Kalautan ini didasarkan kepada bahwa sebagian besar masyarakat melakukan kegiatan usaha pada dua sektor ini. Riau Daratan misalnya terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan Riau Kepulauan sebagian besar masyarakatnya melakukan kegiatan usaha pada sektor perikanan dan kelautan. Selanjutnya sampai 10 Mei dana pinjaman yang masih tersedia untuk

disalurkan adalah sebesar Rp. 3,178 milyar.

Pola Penyaluran Pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah secara garis besarnya dilakukan dengan 2 pola yakni, pola *executing* dan *channelling*.

1. Pola *Execcuting* adalah pola dimana Bank sebagai penyedia sumber dan risikonya kepada Bank yang bersangkutan. Sumber dana yang disalurkan oleh Bank tersebut adalah dana yang diperoleh dari mobilisasi dana yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan baik itu dalam bentuk deposito, tabungan giro dan lain-lain. Dana tersebut kemudian oleh Bank yang bersangkutan disalurkan kepada UKM secara langsung melalui kelompok, dan apabila terjadi sesuatu seperti kredit

macet maka resiko ditanggung oleh Bank yang bersangkutan.

2. Pola *Channelling* adalah pola dimana Bank sebagai penyalur dana yang disediakan oleh lembaga penyedia sumber dana dan resiko berada pada pihak penyedia dana. Ini seperti Dana Pinjaman Modal dimana Pemerintah Provinsi Riau sebagai penyedia dana dan BPD sebagai Bank penyalur dana. Apabila terjadi sesuatu yang berhubungan dengan pinjaman modal tersebut resiko ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Disamping KUK dan Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan, di Provinsi Riau juga telah disalurkan Modal Ventura. Adapun posisi penyaluran modal ventura 31 Desember tahun 2000 adalah seperti Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Perkembangan Penyaluran Modal Ventura 31 Desember 2000,

No	Kabupaten/Kota	Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)	
		Jumlah PPU	Total Pembiayaan
1.	Inhu	2	150.000.000
2.	Inhil	4	136.900.000
3.	Kepulauan Riau	5	184.274.248
4.	Karimun	3	100.000.000
5.	Kampar	8	223.000.000
6.	Pelalawan	5	425.000.000
7.	Bengkalis	34	5.296.849.316
8.	Siak	1	250.000.000
9.	Pekanbaru	273	65.595.874.591
10.	Batam	131	8.158.914.762
	Jumlah	466	80.520.812.917

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2001

Data Tabel 6 di atas posisi penyaluran modal ventura pada tahun 2000. Total dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 80,520 milyar untuk 466 unit usaha. Penyaluran modal ventura tersebut menyebar di 10 Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten/kota terbesar

menerima penyaluran modal tersebut adalah Kota Pekanbaru dengan nilai total sebesar Rp.65,595 milyar dengan jumlah unit usaha penerima sebanyak 273 unit. Ini berarti bahwa sebagian besar modal ventura yakni sebesar 81,46% disalurkan di kota Pekanbaru. Kondisi yang

demikian dapat dipahami karena kota Pekanbaru merupakan kota di Provinsi Riau yang memiliki jumlah unit usaha kecil dan menengah terbesar, dan memiliki akses informasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten / kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Selanjutnya di Provinsi Riau juga disalurkan dana bantuan modal dari 3

kelompok pengusaha, yakni Jimbaran, Kunas, PB Daerah. Penyaluran dana bantuan modal tersebut dalam rangka gelar kemitraan. Besarnya dana gelar kemitraan yang telah disalurkan di provinsi Riau menurut kelompok pengusaha dapat dilihat pada tabel kelompok pengusaha dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel. 7. Perkembangan Gelar Kemitraan 31 Desember 2000

No	Kelompok Pengusaha	Uraian	Jumlah
1.	Kelompok Jimbaran	Pengusaha Kecil	267
		Koperasi	24
2.	Kelompok Kunas	Rp.000	8.070.390
		Pengusaha Kecil	1
3.	Kelompok PB Daerah	Rp. 000	50.000
		Pengusaha Kecil	96
	Jumlah	Koperasi	66
		Rp. 000	290.174.063
		Pengusaha Kecil	364
		Koperasi	90
		Rp. 000	298.294.453

Sumber: Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Riau, 2001

Data Tabel 7 menunjukkan bahwa total dana yang disalurkan oleh pengusaha untuk membantu usaha kecil dan koperasi di provinsi Riau adalah Rp 298, 294 milyar dengan jumlah pengusaha kecil yang dibantu 364 dan koperasi 90 buah. Pemberian bantuan modal tersebut sudah barang tentu diharapkan dapat meningkatkan *performance* usaha kecil dan koperasi di Provinsi Riau

Bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah, baik dengan pola kredit KUK, Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan, Modal Ventura maupun bantuan modal kelompok pengusaha besar, tentu saja bertujuan untuk meningkat kinerja usaha kecil dan menengah di Provinsi Riau. Namun dilihat dari jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Provinsi Riau

dengan jumlah usaha kecil dan menengah yang telah menerima bantuan tersebut, masih banyak usaha kecil dan menengah yang belum menikmatinya. Hal ini disamping disebabkan masih terbatasnya dana yang tersedia, juga prosedur yang ditetapkan relatif masih sangat rumit. Disatu sisi dapat dipahami bahwa pihak penyalur dana/modal tentu saja tidak mau menanggung resiko yang terlalu besar terhadap dana yang disalurkan. Oleh sebab itu penyalur dana senantiasa berlaku selektif terhadap peminjam dana, sehingga dapat mengurangi resiko tidak dikembalikannya uang yang dipinjamkan. Namun demikian prosedur tersebut secara administratif justru menghambat pihak peminjam untuk memanfaatkan dana yang tersedia, sehingga banyak usaha kecil dan menengah merasa enggan

karena tidak mampu memenuhi syarat administratif yang ditetapkan.

Kondisi Usaha Kecil dan Menengah Saat ini.

Usaha kecil dan menengah yang ada di Provinsi Riau saat ini dihadapkan kepada berbagai masalah yang menyebabkan usaha ini lambat berkembang dan tidak seperti yang diharapkan. Sedangkan di sisi lain seperti diungkapkan diatas usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Lambatnya perkembangan sektor ini disebabkan oleh kendala-kendala berikut ini:

1. Kendala Intern.

Kendala intern ini merupakan permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Riau. Kendala ini berupa :

- a. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia pada sektor UKM.
- b. Lemahnya Organisasi dan Manajemen.
- c. Terbatasnya Akses pembiayaan.
- d. Terbatasnya Jaringan Usaha.

Kesemua kendala yang disebutkan diatas mempunyai andil yang cukup besar sebagai penghambat berkembangnya usaha kecil dan menengah yang ada di Provinsi Riau.

2. Kendala Ekstern.

Sebagaimana halnya kendala intern, kendala ekstern ini juga ikut andil menjadi penghambat berkembangnya usaha kecil dan menengah di Provinsi Riau. Kendala ini sesungguhnya berada di luar diri usaha kecil dan menengah itu

sendiri. Adapun kendala ekstern tersebut adalah:

- a. Iklim Usaha yang kurang Kondusif.
- b. Persaingan yang tidak seimbang
- c. Kondisi perbankan yang belum sehat

Usaha-Usaha Yang Harus Dilakukan

Sebagaimana telah diungkapkan di atas usaha kecil dan menengah adalah unit usaha yang mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang ada di Provinsi Riau, dan digeluti oleh sebagian besar penduduk. Namun demikian tingkat perkembangan usaha ini relatif lamban jika dibandingkan dengan perkembangan usaha besar di Provinsi ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan usaha ini sebagian besar mampu bertahan ditengah badai krisis yang melanda Indonesia. Sejalan dengan usaha untuk mensejahterahkan masyarakat, pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan suatu keharusan. Oleh sebab itu upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi usaha ini, baik itu kendala intern maupun ekstern seperti yang diungkapkan diatas. Dalam konteks ini mau tidak mau diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasinya dengan berbagai kebijakan baik kebijakan memberikan iklim kondusif maupun intervensi. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktifitas Usaha

- a. Kewirausahaan mendorong usaha baru dengan percontohan usaha.
- b. Desiminasi peluang usaha.
- c. Pelatihan kewirausahaan.
- d. Prospektif.
- e. Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan, baik itu manajemen

maupun teknik.

- f. Pemanfaatan Informasi dan teknologi
- g. Pengembangan Usaha UKM potensi Ekspor

2. Peningkatan Iklim Pendukung.

- a. Membuat Perda yang mendorong pengembangan iklim usaha.
- b. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha.
- c. Pengembangan jaringan kemitraan dan sistem informasi.

3. Penguatan Modal.

- a. Mempermudah akses ke sumber pembiayaan.
- b. Meningkatkan Plafon untuk pembiayaan UKM.
- c. Mempermudah persyaratan administratif

Daftar Kepustakaan

Bank Indonesia, 2001, *Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Provinsi Riau*, Vo. 1, No 8, Pekanbaru.

Bank Pembangunan Daerah, 2002, *Rekapitulasi Dana Pinjaman Modal Per 10 Mei, 2002*, Riau Pos, 12 Mei 2002

Dinas Koperasi dan UKM, 2001, *Rangkuman Data Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah di Proinsi Ria*, Pekanbaru

Jalil, Ashaluddin dkk, 1997, *Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Kepulauan Riau*, Unri Press, Pekanbaru.

Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, PT Widya Karya, Jakarta.

Widyahartono, Bob, 1996, *Strategi Kemitraan Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, No 4, 39-43

Wijaya, Krisna, 2002, *Analisis Pemberdaya Usaha Kecil*, Pustaka Wirausaha Muda, Bogor

Yusril, M, 1996, *Pola Pembinaan Industri Kecil Dalam Menghadapi Abad XXI*, Jurnal Ekonomi No. 4, 31- 38.